

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang mengalami transformasi paling signifikan dalam sejarah keamanan modern. Pada era Perang Dunia II, Jepang sangat agresif dan dikatakan tidak ingin menyerah (Alghifari & Olga Letticia, 2016, p. 19). Bila diruntutkan kejadiannya, Jepang dengan percaya diri dan tidak ingin menyerah, membuat Amerika Serikat melakukan pengeboman dua kota di Jepang yakni Hiroshima dan Nagasaki yang memukul mundur Jepang, hingga akhirnya mereka menyerah di pertengahan tahun 1945. Dilihat dari kebijakan luar negeri Jepang ditandai oleh penggunaan kekuatan militer sebagai instrumen utama dalam memperluas wilayah serta politiknya. Sikap agresif ini berhenti pada kekalahan mutlak Jepang dalam Perang Dunia II, serta intervensi sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat meluncurkan *disarmament* atau pelucutan senjata terhadap Jepang, titik balik fundamental dalam konstruksi identitas dan kebijakan keamanannya atau bisa dikatakan menghancurkan kekuatan militer Jepang pada saat itu (Prabowo, 2021, p. 219).

Pasca Perang Dunia II, Jepang mengalami transformasi radikal dimana menjadi negara pasifis. Transformasi ini terlihat pada konstitusi Jepang, khususnya pasal 9 dimana secara eksplisit melarang penggunaan kekuatan militer sebagai alat penyelesaian sengketa internasional dan menjadi fondasi bagi kebijakan pasifisme Jepang. walaupun terjadi *disarmament*, karena terjadi banyak perubahan pada geopolitik sekitar Asia. Jepang berusaha mempersuasi Amerika Serikat untuk mengizinkan membangun kembali beberapa pertahanan dan mengarah pada pembentukan Jepang *Self-Defense Force* (JSDF) yang bersifat defensif dan terbatas pada wilayah teritorial. Identitas pasifis Jepang bukan hanya hasil tekanan eksternal dari Amerika Serikat, namun juga dari konstruksi normatif yang membentuk perilaku Jepang dalam sistem internasional selama beberapa dekade (Prabowo, 2021).

Perubahan identitas nasional melalui militer merupakan upaya asertif dalam menjaga kedaulatan serta menunjukkan adaptasi Jepang terhadap dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Perubahan identitas keamanan Jepang dilihat melalui beberapa bukti yang mendukung. Pertama, pernyataan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengusulkan amandemen pasal 9 konstitusi Jepang, yang awalnya melarang Jepang memiliki kapabilitas militer serta kebijakan pasif bergeser menjadi lebih aktif dalam menghadapi tantangan keamanan, ketika Tiongkok menghadirkan kapal militer di sekitar Kepulauan Senkaku, Jepang merespon melalui penjagaan militer pesisir pantai. Abe memandang bahwa reinterpretasi pasal 9 merupakan langkah mendesak untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional Jepang. Pernyataan Shinzo Abe dikategorikan dalam bentuk asertif karena berusaha menunjukkan kekuatan sikap dan keyakinan yang tegas terhadap pentingnya perubahan tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis terencana dan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang. Sikap Abe memiliki tekad yang kuat dalam menjalankan reformasi konstitusional karena merasa mendesak legitimasi Jepang (Ramadhan & Tawakal, 2023).

Kedua, peningkatan anggaran yang berfokus pada modernisasi angkatan bersenjata pada 2022, pengadaan pesawat tempur canggih F-35 dan sistem pertahanan rudal. Jepang meningkatkan anggaran pertahanan dari 1% mencapai 2% dari PDB pada tahun 2027, jumlah absolut sangat besar karena mencapai sekitar 320 miliar dolar AS yang menempatkan Jepang sebagai negara anggaran belanja militer terbesar ketiga di dunia, pertama diduduki oleh Amerika Serikat dan kedua Tiongkok, hal ini tidak semata-mata menaikkan anggaran militer dikarenakan modernisasi, hal ini juga merupakan akumulasi dari persepsi ancaman yang berkembang sejak satu dekade sebelumnya selaras dengan persepsi ancaman di sekitar Kepulauan Senkaku dan Laut China Timur, keputusan ini diartikan bahwa asertivitas Jepang telah bertransformasi menjadikan kebijakan jangka panjang dan memperlihatkan bahwa Jepang memandang ancaman tersebut bersifat berkelanjutan.

Ketiga, tiga dokumen strategis yang telah disepakati, yaitu rencana pengadaan, strategi keamanan nasional, dan rencana pertahanan nasional. Ketiga dokumen tersebut memberikan kerangka kerja dalam pengembangan kekuatan militer Jepang dengan memastikan alokasi anggaran sejalan dengan tujuan strategis negara (Ramadhan Antuli et al., 2024, p. 8).

Keempat, penerapan kebijakan *non-recognition* dan *non-acceptance* terhadap tindakan Tiongkok yang memberlakukan tindakan 'zona identifikasi pertahanan udara' dimana Jepang secara tegas tidak mengakui legitimasi kebijakan tersebut dan termasuk dalam salah satu bentuk respon diplomasi Jepang menghadapi tindakan unilateral Tiongkok di kawasan Kepulauan Senkaku. Jepang secara aktif menginstruksikan maskapai nasional untuk mengabaikan ADIZ, menyampaikan protes resmi berulang terhadap badan hukum maritim internasional, serta menggalang dukungan negara aliansi. Tindakan tersebut mencerminkan sikap tegas dalam mempertahankan posisi hukum dan kedaulatan tanpa mengadopsi eskalasi militer terbuka (Tamisari & Heryadi, 2017, p. 45).

Kelima, Jepang secara sadar mengaitkan isu sengketa ini dengan kerangka keamanan nasional melalui dokumen pertahanan resmi. Senkaku tidak diposisikan sebagai sengketa administratif saja, tapi sebagai bagian dari kepentingan vital dan perlu kesiapsiagaan pertahanan. Isu ini dimasukkan dalam *National Defense Program Guidelines* dan *National Security Strategy* pada 2015 yang menegaskan peningkatan kapasitas militer Jepang yang berfokus pada, modernisasi dan peningkatan kemampuan angkatan bersenjata, termasuk kemampuan militer yang lebih ofensif. Lalu menyesuaikan kekuatan militer dengan kebutuhan menghadapi keamanan yang berkembang dan penekanan pada keamanan nasional yang berorientasi pada pertahanan diri yang fleksibel dan menyesuaikan dengan situasi global. Selanjutnya, meningkatkan peran dan kapasitas militer dalam kerangka pasukan pertahanan yang aktif dan fleksibel, dimana memperbolehkan operasi di luar wilayah pertahanan sendiri.

Mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam menghadapi tantangan keamanan regional dan global (Alghifari & Olga Letticia, 2016). Lalu terjadi

kebijakan NDPG pada 2018, dimana menekankan perlunya penguatan pertahanan wilayah barat daya, secara eksplisit dimaksud Kepulauan Senkaku. lalu kebijakan baru NSS dan NDPG 2022, menegaskan bahwa Kepulauan Senkaku sebagai bagian dari tantangan keamanan utama Jepang di Laut Cina Timur, berarti bahwa peningkatan status sengketa ke level strategis terjadi setelah sengketa dengan Tiongkok yang semakin memanas.

Stabilitas identitas pasifik Jepang mengalami tantangan serius ketika adanya perubahan dinamika geopolitik di Asia Timur, salah satunya peningkatan kekuatan Tiongkok, bukti paling nyata dari dinamika tersebut adalah sengketa Kepulauan Senkaku. sejak Tiongkok mengklaim kepulauan Senkaku sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya Tiongkok mendatangkan peningkatan militer di sekitar Kepulauan Senkaku yang memaksa Jepang melakukan perubahan kebijakan keamanan. Ketika Tiongkok mengklaim teritorial di Kepulauan Senkaku dan memiliki hak atas pulau-pulau tersebut berdasarkan peta kuno, Tiongkok telah rutin mengerahkan militernya ke dalam perairan teritorial sekitar Kepulauan Senkaku sejak 2012. Kehadiran militer tersebut bertujuan menormalkan Kepulauan Senkaku serta menentang posisi Jepang atas klaim wilayah tersebut secara administratif. Tiongkok memberlakukan Zona Identifikasi pertahanan udara sebagai langkah ofensif dalam memperkuat klaim kedaulatan Tiongkok atas wilayah Kepulauan Senkaku (Tamisari & Heryadi, 2017, p. 15).

Kebijakan luar negeri Tiongkok dalam penerapan zona pertahanan udara tersebut mencerminkan prinsip realisme ofensif karena memaksimalkan kekuatannya di sekitar Kepulauan Senkaku. Peningkatan militer Tiongkok dengan menerapkan strategi Attrisi, dimana kapal-kapal penjaga pantai melakukan patroli lebih lama dan lebih sering ini dirancang untuk mengembangkan kapasitas Tiongkok dalam menanggapi aktivitas Jepang. Tindakan Tiongkok berpotensi mengubah status quo di Laut China timur karena bertujuan mengklaim kontrol atas Kepulauan Senkaku dalam jangka panjang dan merubah pengakuan internasional untuk melihat kehadiran Tiongkok pada kawasan tersebut. Media resmi Tiongkok ikut serta mengangkat ketidakpercayaan terhadap Jepang untuk memperkuat

identitas nasional dan membangun rasa kebangsaan yang kuat (Burcu, 2023). Eskalasi tersebut meningkatkan risiko konflik antara Jepang dan Tiongkok karena memiliki kontak lebih sering antara penjaga pantai kedua negara terutama saat musim penangkapan ikan karena interaksi antara kapal-kapal meningkat yang bisa menyebabkan ketegangan lebih besar dan berpotensi bentrokan (Patalano, 2020, p. 2).

Upaya Tiongkok dalam menegaskan klaim kedaulatannya atas Kawasan Senkaku bukan hanya melalui pernyataan diplomatik, namun secara substansial diimplementasikan melalui proyeksi kekuatan militer dan penegak hukum maritim. Kehadiran aset-aset Tiongkok dalam zona maritim sekitar kawasan sengketa telah menjadi faktor utama dalam kontestasi kedaulatan dengan Jepang. Strategi Tiongkok didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu konsistensi operasional, pembentukan 'new normal' dan praktik jangka panjang yang terencana, bukan sekedar provokasi.

Karakteristik strategi dari Tiongkok yang paling menonjol adalah kehadiran yang dilakukan secara rutin, konsisten, dan berulang yang dilakukan unit maritimnya, terutama kapal penjaga pantai Tiongkok (*China Coast Guard*). Kehadiran yang berulang ini bentuk menantang secara sistematis yurisdiksi administratif Jepang atas kawasan tersebut. Data menunjukkan bahwa kapal-kapal tersebut konsisten memasuki *Contiguous Zone* dan *Territorial Waters* di sekitar Kepulauan Senkaku. rutinitas ini memunculkan klaim kedaulatan Tiongkok tidak pernah selesai bahkan dilupakan oleh komunitas internasional (Krickel-Choi & Chen, 2023, p. 302).

Tiongkok menjaga tingkat kehadiran dengan memastikan selalu ada kapal Tiongkok yang berpatroli di dekat wilayah sengketa, secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan komitmen yang tidak berkesudahan terhadap klaim teritorialnya. Hal tersebut memungkinkan Tiongkok mengumpulkan data, menguji waktu respons penjaga pantai Jepang, dan membiasakan operasional maritimnya di lingkungan yang menantang. Selanjutnya, konsep 'new normal' merujuk pada perubahan kondisi status quo dimana aktivitas maritim Tiongkok dianggap sebagai

eskalasi, kini mulai diterima sebagai bagian dari operasional sehari-hari. Bila dahulu kehadiran kapal CCG di Zona bersebelahan dianggap serius, kini frekuensi dan durasi kehadiran tersebut meningkatkan ambang batas toleransi internasional.

Peningkatan aktivitas militer Tiongkok di Senkaku harus dipahami sebagai praktik jangka panjang dan terstruktur, bukan sekedar respon terhadap kebijakan Jepang. Niat dari Tiongkok melakukan hal tersebut karena ingin membangun legitimasi historis dan fakta melalui tindakan fisik yang berkelanjutan di laut (Krickel-Choi & Chen, 2023, p. 303). Strategi ini menyatakan bahwa kontestasi kedaulatan yang mendalam membutuhkan penegasan yang berkelanjutan. Tiongkok sebagai penerus klaim True China, merasa berkewajiban mempertahankan narasi 'usurped territory'. Dengan demikian, operasi militer maritim Tiongkok berfungsi ganda: pertama, sebagai penegasan kedaulatan teritorial dan kedua, sebagai *ontological security seeking* (Krickel-Choi & Chen, 2023, p. 317). Tiongkok melakukan pendekatan ini karena ingin memastikan bahwa tindakan Tiongkok sekecil apapun itu tetap berkontribusi pada tujuan strategis jangka panjang untuk mengubah status quo di kawasan Senkaku.

Jepang mengubah pola respons dari pendekatan administratif pasifis menuju penegakan kedaulatan secara operasional di sekitar Kepulauan Senkaku. perubahan ini terlihat dari peningkatan signifikan patroli Japan Coast Guard, pembentukan unit khusus penjaga pantai untuk wilayah barat daya yaitu Kepulauan Senkaku, serta integrasi peran JSDF dalam skema pertahanan maritim. Praktik ini diartikan sebagai bentuk asertivitas karena Jepang tidak lagi mengandalkan protes diplomatik, melainkan menghadirkan kehadiran negara secara nyata dan terus-menerus di lapangan (Patalano, 2020, p. 2).

Tindakan Tiongkok merupakan upaya dalam mengimplementasikan kontrol administratif yang secara langsung bertentangan dengan otoritas Jepang. Tiongkok menggunakan taktik awal dengan menantang status quo atau bisa mengacu pada rutinisasi kehadiran Tiongkok yang termasuk langkah awal menantang status quo, dimana Tiongkok memulai latihan kontrol yang sesungguhnya (Patalano, 2020, p. 2). Secara efektif Tiongkok telah menciptakan pola perilaku yang jelas bertujuan

menantang kontrol administratif Jepang. Tiongkok mungkin lebih maju dari yang diperkirakan, hal tersebut menjadi isu yang berpotensi memicu ketidakstabilan di kawasan Senkaku.

Ketika sengketa maritim antara Jepang dan Tiongkok terjadi dan mendapatkan ancaman langsung di sekitar perairannya, Jepang berusaha mencegah ancaman yang akan datang serta ingin melindungi kedaulatan negaranya, melalui sebuah reformasi pada pertahanan militernya. Dengan begitu, Jepang membuat militerismenya kembali kuat. Perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang termasuk sebagai respon terhadap perilaku ofensif Tiongkok serta termasuk dalam kontribusi Jepang terhadap keseimbangan di Kawasan Asia Timur (Alghifari & Olga Letticia, 2016, p. 19).

Ketegangan geopolitik memicu pergeseran identitas keamanan Jepang dari pasifis menuju asertif memengaruhi hubungan ekonomi dan politik di kawasan, dimana sengketa Kepulauan Senkaku ini memengaruhi sikap dan strategi perusahaan asing serta kebijakan luar negeri Jepang. Jepang mulai menyesuaikan strategi ekonominya untuk mengurangi risiko geopolitik akibat eskalasi keamanan (Luo et al., 2022). Dengan pergerakan yang dihitungkan, Jepang berhati-hati dan bersifat selektif untuk mempertimbangkan faktor keamanan sebagai penting dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun investasi. Nasionalisme di kedua negara membuat situasi semakin memburuk, dikhawatirkan bahwa ketidakpuasan publik terhadap Tiongkok dapat memicu tindakan yang lebih agresif dalam mempertahankan klaim teritorial hingga sengketa maritim tersebut memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara yang mengakibatkan pembatalan pertemuan bilateral dan penurunan dalam hubungan diplomatik (Yu & Kim, 2018, p. 11). Eskalasi militer Tiongkok di Kepulauan Senkaku menjadi katalisator yang memengaruhi identitas keamanan Jepang. Dimana Jepang berawal dari negara yang secara historis pasif semenjak kekalahan Perang Dunia II berusaha menghindari keterlibatan militer aktif, kini Jepang bertransformasi menjadi lebih proaktif dalam menghadapi ancaman eksternal. Eskalasi militer Tiongkok di Kepulauan Senkaku memengaruhi konstruksi identitas keamanan Jepang. Interaksi berulang dan penuh

tensi antara Jepang dan Tiongkok menciptakan persepsi baru terhadap ancaman sehingga memaksa Jepang keluar dari kerangka pasifis. Perubahan sikap ini mencerminkan konstruksi sosial atas identitas serta kepentingan nasional Jepang, yang dibentuk melalui interaksi dengan Tiongkok. Jepang membentuk identitas baru dimana saat ini memaksa perubahan kebijakan keamanan yang semakin asertif. Transformasi bukan hanya dari kebijakan pertahanan dan militer, namun juga dalam cara Jepang mendefinisikan dirinya di tengah lingkungan internasional yang semakin kompleks.

1.2 Rumusan Masalah

Peningkatan militer Tiongkok di sekitar Kepulauan Senkaku terus meningkat dalam satu dekade terakhir yang memicu ketegangan signifikan antara Jepang dan Tiongkok. Tindakan agresif seperti patroli maritim, ekspansi kapabilitas Tiongkok, menimbulkan tindakan agresif hingga ancaman strategis yang menantang posisi Jepang. Selama puluhan tahun Jepang telah mempertahankan identitas pasifis dalam kebijakan luar negerinya, namun dengan adanya perubahan lingkungan keamanan, hal ini mendorong Jepang untuk meninjau, memperkuat dan mengambil langkah politik luar negeri yang lebih tegas.

Dengan begitu, dalam memahami bagaimana interaksi politik luar negeri antara Jepang dan Tiongkok, membuka ruang penting untuk dikaji, terutama terkait bagaimana dinamika hubungan kedua negara yang memengaruhi konstruksi identitas keamanan Jepang, maka penelitian ini merumuskan pertanyaan utama sebagai berikut:

“Bagaimana konstruksi norma, ide dan identitas keamanan Jepang dalam merespons peningkatan aktivitas militer Tiongkok di Sengketa Kepulauan Senkaku menggeser karakteristik politik luar negeri Jepang dari pasifis ke Asertif?”

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada periode 2012 hingga 2022, dimulai dari nasionalisasi Kepulauan Senkaku oleh Jepang pada tahun 2012 hingga kebijakan

dan praktik keamanan terbaru Jepang pada tahun 2022. Periode ini dipilih karena mencerminkan fase intensifikasi sengketa dan proses perubahan kebijakan keamanan Jepang secara berkelanjutan. Penelitian ini difokuskan pada kawasan Kepulauan Senkaku sebagai titik utama interaksi keamanan antara Jepang dan Tiongkok. Batasan variabel penelitian yaitu, variabel utama atau dependen pergeseran identitas keamanan Jepang, variabel independen yaitu eskalasi aktivitas militer dan keamanan Tiongkok di sekitar Kepulauan Senkaku dan variabel perantaranya yaitu konstruksi sosial ancaman, interaksi politik luar negeri, redefinisi kepentingan nasional, serta perubahan kebijakan dan praktik keamanan Jepang.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme kausal yang menghubungkan eskalasi aktivitas militer Tiongkok di Kepulauan Senkaku dengan pergeseran identitas keamanan Jepang yang mengarah pada proses konstruksi sosial ancaman yang membentuk cara Jepang memaknai Tiongkok sebagai penyebab sengketa, hal ini tentunya menunjukkan hubungan antara perubahan dan kepentingan nasional Jepang dengan penyesuaian kebijakan dan praktik keamanan Jepang.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Manfaat akademis

Memberikan pemahaman lebih dan memperkaya literatur di bidang hubungan internasional, dilihat dari pertanyaan riset mengenai bagaimana ide, norma, identitas menggeser karakteristik politik luar negeri Jepang dari pasif ke asertif dalam merespons peningkatan militer Tiongkok di sengketa Kepulauan Senkaku memaksa Jepang untuk memperbarui keputusan-keputusan keamanan nasional, sehingga bisa bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan serta memiliki pandangan yang lebih kritis tentang interaksi sosial dalam menanggapi isu-isu keamanan nasional dan internasional

1.5.2 Manfaat praksis

Diharapkan penelitian ini bisa membantu masyarakat dalam memahami konflik sengketa yang terjadi di Kepulauan Senkaku dan memberikan dampak regional seperti stabilitas global dan kepentingan negara-negara lain. Tentunya, penelitian ini belum sempurna dalam mengungkap faktor-faktor dari perubahan Jepang sehingga bisa membuka penelitian baru yang perlu di cari tahu lebih lanjut.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti membagi beberapa bagian. Adapun tujuannya untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan terstruktur, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami para pembaca. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Pada bagian ini, Peneliti akan memaparkan latar belakang penelitian, pertanyaan riset tujuan penelitian baik secara teoritik maupun praktik, dan ditutup dengan sistematika penulisan. Bab ini merupakan fondasi utama bagi peneliti dalam mengembangkan penelitian hingga bagian terakhir.

Bab II tinjauan Pustaka:

Bagian ini akan digunakan peneliti untuk menjelaskan landasan teoritik yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan riset yang dimunculkan. Pada bagian ini peneliti juga akan menjelaskan beberapa peneliti terdahulu dan berisi dengan data-data terkait yang akan menunjang proses penelitian.

Bab III Metode Penelitian:

Peneliti akan menjelaskan pendekatan, metode, analisis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menjawab permasalahan yang muncul.

Bab IV Hasil dan Pembahasan:

Pada bagian ini peneliti akan melakukan proses pengkajian terhadap referensi- referensi dan sumber data yang ada guna menemukan perubahan identitas Jepang karena terjadi ancaman eksternal dari Tiongkok pada Kepulauan Senkaku.

Bab V kesimpulan:

Pada bagian ini, peneliti akan memberikan kesimpulan atas proses pengkajian terhadap referensi-referensi dan sumber data yang ada serta memberikan jawaban atas pertanyaan riset yang telah dimunculkan. Peneliti juga akan memberikan saran bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini

